

## Paradiplomasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam Kerja Sama Penyelenggaraan *World Surf League* Krui Pro

Muhammad Rizki Fadillah<sup>1</sup>, Moh. Nizar<sup>2</sup>, Luerdi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Hubungan Internasional, Universitas Lampung, Indonesia

fmrizki1@gmail.com<sup>1</sup>, mohnizar@fisip.unila.ac.id<sup>2</sup>, luerdi@fisip.unila.ac.id<sup>3</sup>

---

### Key words :

Paradiplomacy,  
Pesisir Barat  
Regency, WSL  
Krui Pro

### ABSTRACT

*The Pesisir Barat Regency in Lampung Province sought to leverage its local potential, namely its coastal waves, by partnering with the international actor, the World Surf League, to host the WSL Krui Pro. Such a phenomenon deserves investigation, as international cooperation – also known as paradiplomacy – is pursued by subnational actors, which commonly lack bargaining power on the global stage. Using a qualitative research method with descriptive analysis and the concept of paradiplomacy, this research sheds light on the model and purpose of a local government's paradiplomatic practice in organizing an international surfing event during 2017-2024. Data was gathered through interviews and library research. The findings show that paradiplomacy by the Pesisir Barat Regency took shape in the model of regional paradiplomacy, which was complementary and opportunity-oriented according to the conceptual framework used. In addition, the local government was pursuing economic, cultural, and technical interests that belong to the first and second layers of paradiplomacy. As represented by the case study of the Pesisir Barat Regency Government in this paper, foreign relations or cooperation by Indonesian subnationals can occur through a bottom-up process, even in underdeveloped regions that are not accustomed to engaging in foreign affairs.*

---



**Kata kunci :**  
Paradiplomasi,  
Kabupaten Pesisir  
Barat, WSL Krui  
Pro

#### ABSTRAK

Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, berupaya memanfaatkan potensi daerahnya yang terkenal berupa ombak pantai melalui kerja sama dengan World Surf League untuk menggelar acara “WSL Krui Pro”. Hal tersebut menarik untuk dikaji melihat kerja sama internasional – juga dikenal dengan paradiplomasi – dilakukan oleh aktor subnasional yang umumnya tidak memiliki daya tawar tinggi di kancah internasional. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan konsep paradiplomasi, penelitian ini menganalisis model dan tujuan paradiplomasi yang dilakukan oleh Kabupaten Pesisir Barat dalam penyelenggaraan event olahraga selancar internasional tersebut, dalam periode 2017-2024. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradiplomasi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam penyelenggaraan WSL Krui Pro menggambarkan model paradiplomasi regional, *complementary*, dan *opportunity-oriented* berdasarkan kerangka konseptual yang digunakan. Sedangkan tujuan paradiplomasi tersebut adalah untuk mengejar kepentingan ekonomi, budaya, dan teknis (lapis pertama dan lapis kedua). Dengan studi kasus paradiplomasi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, hubungan atau kerja sama luar negeri oleh subnasional Indonesia pada dasarnya dapat terjadi secara *bottom-up*, bahkan oleh daerah yang masuk dalam status daerah tertinggal dan masih belum terbiasa dengan kerja sama luar negeri.

## I. Pendahuluan

Kebutuhan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat Provinsi Lampung untuk mempromosikan sektor pariwisata bahari yang sejalan dengan visi misi World Surf League (WSL) untuk mengembangkan olahraga selancar sebagai olahraga internasional menciptakan kerja sama antara kedua pihak. Mengawali intensi kerja sama tersebut, Pemkab Pesisir Barat menandatangani pelbagai *Memorandum of Understanding* (MoU) kerja sama dengan Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PSOI), komunitas atau organisasi yang menaungi olahraga selancar di Indonesia, yang bertujuan untuk menjadikan PSOI sebagai jembatan penghubung antara Pemkab Pesisir Barat dan WSL.



Gambar 1. Peta Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung  
Sumber: Pemkab Pesisir Barat (2025)





Kerja sama yang terbentuk berupa kompetisi selancar internasional yang diselenggarakan di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, bernama “WSL Krui Pro”. *Event* tersebut telah berlangsung setiap tahun sejak 2017, namun sempat terhenti pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi Covid-19. Sampai tahun 2024, telah berlangsung 6 kali kejuaraan dari level yang terendah, *Qualyfyng Series* (QS) 1000 pada tahun 2017 hingga menjadi QS 5000 yang diselenggarakan pada tahun 2024 (Pemkab Pesisir Barat, 2024b).

Kerja sama internasional antara Pemkab Pesisir Barat dan WSL dalam penyelenggaraan WSL Krui Pro merupakan topik yang menarik untuk dikaji, melihat kerja sama yang terbentuk digerakkan oleh aktor subnasional (seperti pemerintah daerah) yang tidak memiliki nilai tawar dan kedudukan yang kuat di dunia internasional. Penyelenggaraan acara olahraga internasional umumnya didominasi oleh negara atau lembaga negara dengan *power* yang lebih besar (Ramadhan et al., 2022). Jarang daerah dengan status terisolasi atau tertinggal, misalnya di Indonesia, memiliki keinginan untuk mengadakan kerja sama internasional.

Pesisir Barat termasuk dalam kategori daerah tertinggal (2020-2024) dan baru keluar dari status tersebut berdasarkan Keputusan Mendes-PDPT No. 490 Tahun 2024 (Pemkab Pesisir Barat, 2024a). Namun, Kabupaten Pesisir Barat dengan berbagai keterbatasannya telah mengadakan *event* kompetisi selancar internasional sebagai agenda rutin. Beberapa studi terdahulu telah membahas tema paradiplomasi terkait upaya kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Studi ini dikelompokkan ke dalam dua tema utama: paradiplomasi di Provinsi Lampung (Sidik, 2019; Simbolon, 2022) dan paradiplomasi melalui penyelenggaraan acara bertaraf internasional (Diva et al., 2024; Luerdi, 2023; Rachmawati & Dewi, 2020; Ramadhan et al., 2022).

Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung melihat peluang dan tantangan dalam menjalin kerja sama internasional (Sidik, 2019; Simbolon, 2022). Studi ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak potensi, seperti lokasi strategis, kekayaan sumber daya, dan sektor pariwisata, upaya paradiplomasi masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya dukungan kelembagaan. Namun, kedua studi ini belum membahas peran kabupaten secara khusus, terutama dalam konteks penyelenggaraan *event* internasional.

Studi lainnya menunjukkan bagaimana pemerintah daerah di Indonesia menggunakan *event* internasional sebagai sarana untuk mempromosikan daerahnya ke dunia luar. Misalnya, Jakarta menyelenggarakan ajang balap hijau Formula E (Luerdi, 2023; Ramadhan et al., 2022), Kalimantan Selatan mengadakan festival budaya internasional (Diva et al., 2024), dan Kalimantan Barat aktif menjaga kerja sama di wilayah perbatasan dengan Malaysia (Rachmawati & Dewi, 2020). Studi ini memperlihatkan bahwa melalui *event* internasional, daerah dapat mengejar berbagai kepentingan, seperti pariwisata, investasi, pelestarian budaya, hingga keamanan wilayah. Namun, belum ada studi yang secara khusus melihat bagaimana Pemkab – seperti Kabupaten Pesisir Barat – melakukan paradiplomasi melalui *event* olahraga internasional seperti WSL Krui Pro. Oleh karena itu, studi ini memberikan sudut pandang baru dengan mengkaji bagaimana kabupaten kecil bisa menjalankan diplomasi daerah melalui kerja sama internasional, khususnya dalam konteks penyelenggaraan *event* selancar dunia.





Hal inilah yang menjadi keunikan studi ini. Studi ini akan mendeskripsikan model dan tujuan paradiplomasi dalam praktik kerja sama hubungan luar negeri yang dilakukan oleh Pemkab Pesisir Barat dalam penyelenggaraan WSL Krui Pro periode 2017-2024.

## **II. Kerangka Konseptual: Definisi, Model, dan Tujuan Paradiplomasi**

Paradiplomasi dapat diartikan beragam, seperti aktivitas internasional (Lecours, 2002), kapasitas dan partisipasi politik luar negeri (Wolff, 2007), komunikasi politik (Kuznetsov, 2015), atau keterlibatan dalam hubungan luar negeri (Tubilewicz & Omond, 2021) yang dilakukan oleh aktor selain pemerintah pusat/nasional (misalnya subnasional) untuk mengejar berbagai kepentingan. Keragaman definisi paradiplomasi juga diikuti oleh keragaman fokus kajiannya. Paradiplomasi bukanlah kajian arus utama dalam ilmu hubungan internasional, sehingga masih berpeluang untuk pengembangan sebagai akibat dari keragaman karakteristik seperti derajat otonomi subnasional dan sistem politik negara.

Soldatos (2001) menawarkan dua kategori paradiplomasi berdasarkan pendekatan demografis, yaitu isu-isu dan keterkaitannya dengan komunitas atau warga lokal:

- a) Paradiplomasi global. Paradiplomasi ini terjadi ketika melibatkan isu-isu yang tidak langsung bersinggungan dengan komunitas lokal, umumnya bersifat global dan terdapat dalam sistem internasional (seperti perang, damai, liberalisasi pasar, dll.);
- b) Paradiplomasi regional. Paradiplomasi ini terjadi ketika isu-isu yang secara langsung atau nyata bersinggungan dengan komunitas lokal. Model paradiplomasi ini dapat dibagi menjadi (i) paradiplomasi mikro-regional, ketika interaksi paradiplomasi regional melibatkan dua daerah yang memiliki batas wilayah bersinggungan secara langsung (*transborder*); dan (ii) paradiplomasi makro-regional, ketika interaksi paradiplomasi regional tidak melibatkan dua daerah yang memiliki perbatasan langsung.

Paradiplomasi tidak dapat dipisahkan dari politik luar negeri. Negara, khususnya dalam situasi yang didorong oleh krisis, akan melakukan rasionalisasi politik luar negeri sebagai konsekuensi adanya berbagai segmentasi seperti aktor, persepsi, dan tujuan seiring dengan menguatnya tuntutan demokratisasi. Soldatos (2001) melihat rasionalisasi politik luar negeri dalam tiga bentuk:

- a) Internasionalisasi (supranasional). Pembentukan sistem yang memberikan wewenang yang besar ke pada aktor yang lebih rendah untuk melaksanakan hubungan luar negeri;
- b) Sentralisasi. Dalam bentuk ini, politik luar negeri sepenuhnya dikendalikan oleh dan menjadi wewenang pemerintah pusat;
- c) Desentralisasi. Adanya penyebaran wewenang di mana politik luar negeri tidak dimonopoli oleh pemerintah pusat; sebaliknya, subnasional juga dapat berperan sesuai dengan kadar tertentu. Dalam model desentralisasi politik luar negeri inilah subnasional dapat menjalankan paradiplomasi.





Dengan mempertimbangkan berbagai segmentasi politik luar negeri, Soldatos (2001) juga membagi tindakan paradiplomasi ke dalam model *cooperative action (supportive)* dan *parallel action (substitutive)*:

- a) *Cooperative action*. Model *cooperative action* dapat dibagi menjadi dua: (i) *coordinated-cooperative*, model ini terjadi ketika aksi paradiplomasi subnasional dikoordinasikan oleh pemerintah pusat, misalnya melalui perjanjian-perjanjian atau melalui institusi relasi pemerintah pusat-subnasional; dan (ii) *joint-cooperative*, model ini terjadi ketika pemerintah pusat dan subnasional bersama-sama (melalui misi, pendekatan bersama) *vis-à-vis* aktor luar negeri.
- b) *Parallel action*. Model *parallel action* juga dapat dibagi menjadi dua: (i) *parallel-harmony*, model ini terjadi ketika subnasional memiliki kompetensi konstitusional untuk menjalankan hubungan luar negeri secara mandiri “dengan” atau “tanpa” monitoring dari pemerintah pusat, namun tidak bertentangan dengan kerangka kepentingan nasional dan koordinasi informal dengan pemerintah pusat masih dapat terjadi; dan (ii) *parallel-disharmony*, model ini terjadi ketika aktivitas luar negeri subnasional bertentangan dengan politik luar negeri negara.

Berdasarkan rasionalisasi politik luar negeri di atas, model *cooperative action* dan *harmonious parallel* dapat masuk dalam bentuk desentralisasi terkoordinasi (*coordinated desentralization*), yang membolehkan subnasional dalam hal-hal berikut (Soldatos, 2001). :

- a) mempromosikan kepentingan mereka secara internasional, namun sesuai dengan kerangka kepentingan nasional;
- b) berbagi beban dan mengumpulkan kekuatan dan sumber daya pembuatan keputusan luar negeri bersama pemerintah pusat;
- c) melakukan berbagai tindakan yang bersifat melengkapi.

Bila dilihat dari dimensi persepsi, model *cooperative action* dan *harmonious parallel* merefleksikan paradiplomasi berorientasi peluang (*opportunity-oriented*), sedangkan model *parallel-disharmony* merupakan tantangan (*challenge*) bagi satu bangsa karena dapat mengarah pada fragmentasi (disintegrasi) (Kuznetsov, 2015).

Model yang dikembangkan oleh Soldatos memiliki kelemahan karena digunakan untuk menjelaskan praktik-praktik lazim paradiplomasi di negara-negara yang menganut federalisme, sehingga tidak selalu atau benar-benar sesuai untuk menganalisis bentuk paradiplomasi, misalnya dalam sistem negara kesatuan. Schiavon (dalam Ksenicz, 2023) juga menawarkan alternatif model paradiplomasi dengan dua variabel, yaitu tingkat inklusi-eksklusi subnasional dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan luar negeri nasional, dan tingkat kewenangan yang diberikan kepada subnasional untuk terlibat dalam hubungan internasional.

Kerangka paradiplomasi oleh Sciavon (dalam Ksenicz, 2023) dapat dikelompokkan dalam empat model:

- a) *Exclusive*. Pemerintah pusat mengontrol penuh pembuatan kebijakan luar negeri dan implementasinya, dan subnasional tidak memiliki *power* konstitusional untuk terlibat dalam hubungan internasional;
- b) *Consultative*. Pemerintah pusat berkonsultasi dengan subnasional dalam pembuatan dan implementasi kebijakan luar negeri, meskipun mereka tidak memiliki kewenangan konstitusional yang eksplisit dalam hal ini;







- c) *Complementary*. Pemerintah pusat mengendalikan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri, namun subnasional memiliki kewenangan konstitusional untuk menjalankan hubungan internasional di bidang kebijakan tertentu;
- d) *Inclusive*. Subnasional tidak hanya memiliki kewenangan konstitusional, tetapi juga berpartisipasi dalam pembuatan dan implementasi kebijakan luar negeri nasional.

Model *complementary* oleh Schiavon di atas sesuai atau dapat mendukung paradiplomasi model *coordinated decentralization (cooperative action, harmonious parallel)*. Bangunan pelbagai konsep paradiplomasi di atas dapat diilustrasikan melalui diagram di bawah ini:

Diagram 1. Konstruksi/Bangunan Konsep Paradiplomasi

|                             |                                        |                                                                      |                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Paradiplomacy action</i> | <i>Cooperative action (supportive)</i> | <i>Coordinated-cooperative</i>                                       | <i>(Coordinated) Decentralization</i> |
|                             |                                        | <i>Joint-cooperative</i>                                             |                                       |
|                             | <i>Parallel action (substitutive)</i>  | <i>Parallel-harmony</i><br>- with monitoring<br>- without monitoring | <i>Complementary Opportunity</i>      |
|                             |                                        | <i>Parallel-disharmony</i>                                           | <i>Fragmentation Challenge</i>        |

Sumber: adaptasi oleh penulis (Ksenicz, 2023; Kuznetsov, 2015; Soldatos, 2001)

Terkait tujuan aktifitas paradiplomasi, Lecours (2008) membagi tiga lapis paradiplomasi: lapis pertama (ekonomi), lapis kedua (budaya, pendidikan, teknis, dll.), dan lapis ketiga (politik). Dalam tujuan ekonomi, subnasional berupaya mengejar kepentingan ekonomi, seperti kompetisi ekonomi dunia dengan membangun jejak global untuk menarik modal asing, menarik perusahaan global ke wilayahnya, dan mengejar pasar ekspor baru dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Lecours, 2008). Pada lapis kedua, paradiplomasi bersifat multi-dimensi di mana subnasional berupaya melakukan kerjasama untuk mempromosikan budaya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas pendidikan, dan lainnya (Lecours, 2008).

Pada lapisan terakhir (politik), dimaksudkan sebagai ekspresi internasional akan identitas “berbeda” (*distinct*) dari apa yang sering diproyeksikan oleh negara induk. Paradiplomasi ini mengafirmasi perbedaan budaya, otonomi politik, dan karakter bangsa dari komunitas/warga yang mereka wakili (Lecours, 2008). Penonjolan identitas “bangsa” di ranah global dapat menjadi upaya untuk membangun *positioning* subnasional dalam politik nasional. Terkait tujuan politik paradiplomasi ini – bila tidak dikelola dengan baik – dapat mengarah pada disintegrasi.





### III. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan konsep paradiplomasi untuk memahami praktik paradiplomasi Pemkab Pesisir Barat dalam kerja sama penyelenggaraan *event* internasional WSL Krui Pro. Fokus penelitian diarahkan pada analisis model dan tujuan paradiplomasi. Data yang digunakan diperoleh dari data primer (hasil wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat) dan data sekunder berupa artikel ilmiah dan sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara semi terstruktur dan studi pustaka. Data dianalisis dengan model interaktif yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menghasilkan informasi yang terstruktur dan menjawab pertanyaan penelitian (Miles et al., 2014).

### IV. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Sejarah Proses dalam Kerja Sama

Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, yang resmi berdiri pada tahun 2014, memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, khususnya olahraga selancar. Pemkab memanfaatkan potensi ombak kelas dunia untuk mempromosikan daerah melalui *event* internasional, salah satunya dengan menggandeng organisasi internasional, dalam hal ini WSL. Keterlibatan WSL memungkinkan kolaborasi antaraktor transnasional dalam upaya meningkatkan visibilitas destinasi, menarik kunjungan wisatawan mancanegara, dan memperkuat posisi Pesisir Barat dalam jaringan pariwisata internasional.

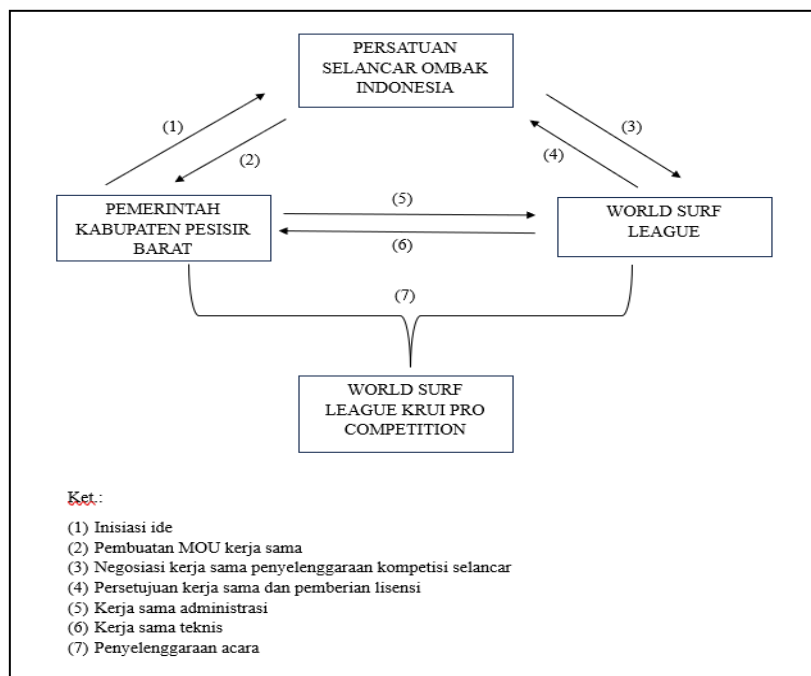
PSOI berperan penting dalam menjembatani kerja sama dengan WSL (Komunikasi Pribadi, 20 November 2024). PSOI merupakan komunitas peselancar profesional yang memiliki jejaring ke luar yang juga tergabung dalam organisasi dengan skala yang lebih besar, baik dalam lingkup regional (*Asian Surfing Federation* – ASF) maupun lingkup global (*International Surfing Association* – ISA). PSOI dan organisasi-organisasi internasional tersebut juga bermitra dengan organisasi yang serupa lainnya seperti *Asian Surf Cooperative* (ASC), WSL, dan lainnya.

Penyelenggaraan *event* selancar internasional di Pesisir Barat pertama kali dimulai pada 2017 dan saat itu masih menjadi bagian dari Festival Teluk Stabas (FTS) (Komunikasi Pribadi, 20 November 2024). Kompetisi selancar tersebut terus berkembang dan kemudian dibentuk *event* tersendiri atau terpisah di bawah naungan WSL. WSL dipilih sebagai mitra karena jangkauan globalnya yang luas dan kemampuannya dalam mempromosikan *event* ke audiens internasional. Penyelenggaraan Krui Pro pun terus berkembang dari tahun ke tahun, baik dari sisi skala maupun jumlah peserta.





Mekanisme kerja sama ini terbagi dalam tujuh tahapan: inisiasi ide, penyusunan MoU, negosiasi, persetujuan kerja sama dan pemberian lisensi, kerja sama administrasi, kerja sama teknis, dan penyelenggaraan acara, seperti ilustrasi berikut:



Gambar 2. Mekanisme dan Tahapan Kerja Sama  
 Sumber: diolah penulis

Tahapan dimulai dari gagasan Bupati Pesisir Barat tahun 2016 yang ingin menjadikan Kabupaten Pesisir Barat sebagai destinasi wisata berbasis budaya dan alam (Komunikasi Pribadi, 20 November 2024). Meskipun sempat gagal menjadi tuan rumah cabang olahraga selancar *Asian Games* 2018, Pemkab Pesisir Barat tetap melanjutkan upaya pengembangan lewat kerja sama dengan aktor-aktor selancar seperti pegiat selancar Tipi Jabrik (perwakilan ASC) dan PSOI, yang kemudian menjadi penghubung dengan WSL.

Perwakilan Dinas Pariwisata Pemkab sempat diutus ke Bali dan membawa pegiat selancar dan komunitas selancar untuk datang berkunjung ke Pesisir Barat (Komunikasi Pribadi, 20 November 2024). Perjumpaan ini kemudian mengarah kepada kemitraan dalam bentuk *event* selancar yang waktu itu masih dalam rangkaian FTS. Keinginan untuk membentuk kompetisi selancar tersendiri atau terpisah mengharuskan Pemkab bekerja sama secara intens dengan PSOI yang dapat menghubungkan aspirasi tersebut dengan WSL.

Studi menunjukkan bahwa paradiplomasi yang melibatkan daerah dapat digerakkan oleh individu kepala daerah (Kosovac et al., 2021; Rapoport et al., 2019). Dalam hal ini, kepala daerah memiliki peran melalui gagasan, preferensi, maupun aspek-aspek kepemimpinan lainnya yang mendorong aktivitas transnasional atau keterlibatan internasional. Dalam kasus penyelenggaraan WSL Krui Pro, inisiatif untuk menjadi tuan rumah *event* selancar berskala internasional dimulai oleh Bupati Pesisir Barat yang dikejar melalui birokrasi Pemkab dan memobilisasi sumber daya yang ada.







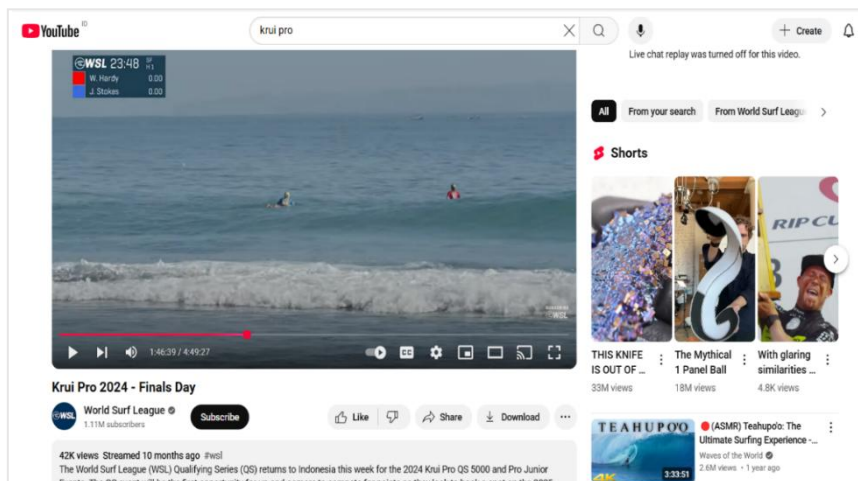
Namun, keinginan untuk memajukan Pesisir Barat dalam hal budaya maupun pariwisata masih selaras dengan visi provinsi dan pusat. Pengembangan sektor pariwisata berbasis potensi alam dan pelestarian warisan budaya lokal searah dengan agenda pembangunan nasional yang menekankan pada prinsip daya saing, keberlanjutan, dan kesejahteraan warga tempatan. Dalam hal ini, pengembangan pariwisata merupakan integrasi kesadaran lingkungan dan promosi pertumbuhan ekonomi tanpa melupakan nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Dengan demikian, *event* WSL Krui Pro dapat memajukan pariwisata olahraga, khususnya selancar di Lampung dan Indonesia (Pemprov Lampung, 2024).

Setelah itu, disusunlah MoU antara Pemkab dan PSOI yang secara formal mengikat kerja sama dan mengatur peran masing-masing pihak (Komunikasi Pribadi, 20 November 2024). Negosiasi dilakukan untuk merumuskan teknis pelaksanaan, termasuk pembagian tanggung jawab, lisensi, dan standar kompetisi. PSOI diberi lisensi sebagai pelaksana teknis, sementara pemerintah kabupaten bertindak sebagai fasilitator dan pengawas. Tahapan administrasi dilakukan oleh Pemkab dengan mengoordinasikan dinas-dinas terkait, sementara tahap teknis dilaksanakan oleh PSOI yang juga turut melakukan pelatihan SDM lokal.

Penyelenggaraan kompetisi menjadi puncak dari seluruh proses ini, dengan penyertaan *side event* berupa pameran budaya dan ekonomi lokal yang memperkuat keterlibatan masyarakat. Sedangkan pemerintah di level provinsi dan pusat berperan dalam wilayah regulasi (Komunikasi Pribadi, 20 November 2024). Dalam hal ini, Pemkab tetap harus mengantongi persetujuan dari pemerintah pusat dan berkoordinasi dengan pihak lain yang lebih tinggi dalam hierarki pemerintahan NKRI. Dalam proses kerja sama yang terjalin, terdapat dua kerja sama utama dalam pelaksanaan WSL Krui Pro, yaitu pelaksanaan kompetisi dan promosi destinasi. Dalam pelaksanaan kompetisi, kolaborasi melibatkan Pemkab, PSOI, dan WSL. Pemkab menyediakan infrastruktur dan pendanaan melalui APBD, PSOI mengelola aspek teknis, dan WSL memberikan legitimasi internasional serta mengatur sistem kompetisi dan promosi global (Komunikasi Pribadi, 20 November 2024). Dalam hal promosi, Pemkab menjalankan kampanye lokal hingga nasional melalui media dan *event* budaya, sementara WSL memanfaatkan jaringan global untuk memperkenalkan Krui sebagai destinasi selancar dunia. PSOI turut mempromosikan melalui komunitas selancar nasional dan Asia.

Kerja sama ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dapat melakukan diplomasi kerja sama luar negeri walaupun tidak secara langsung dengan organisasi internasional, melainkan melalui komunitas olahraga profesional. Studi telah menunjukkan peran komunitas atau organisasi lokal (NGO) dengan jejaring yang mereka miliki dapat memfasilitasi atau mendorong terjadinya kolaborasi lokal-internasional (Moshtari et al., 2024; Tran & Abouassi, 2020). Dalam konteks ini, komunitas olahraga profesional berfungsi sebagai intermedator yang menjembatani kepentingan pemerintah lokal dengan jejaring internasional, yang kemudian menciptakan peluang bagi promosi daerah dan pengembangan kerja sama lintas batas.





Gambar 3. Promosi WSL Krui Pro Melalui Kanal Youtube World Surf League  
Sumber: World Surf League (2024)

## 2. Model Paradiplomasi dalam Penyelenggaraan WSL Krui Pro

Paradiplomasi merupakan strategi subnasional dalam menjalin hubungan internasional demi memenuhi kepentingan lokal. Dalam konteks penyelenggaraan WSL Krui Pro, Pemkab Pesisir Barat berperan sebagai inisiator kerja sama, sementara PSOI menjadi mitra teknis dan penghubung dengan pihak internasional. Kolaborasi ini mencerminkan kemampuan aktor lokal dalam menginisiasi kerja sama luar negeri secara mandiri tanpa atau dengan sedikit intervensi langsung dari pemerintah pusat.

Peran Pemkab tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam merancang strategi pembangunan berbasis potensi lokal. Inisiatif kerja sama dengan WSL berawal dari kesadaran akan potensi alam, terutama ombak kelas dunia yang dimiliki Pesisir Barat. Gagal menjadi tuan rumah cabang selancar *Asian Games* 2018 tidak menyurutkan langkah Pemkab Pesisir Barat untuk tetap menjadikan potensi tersebut sebagai pintu masuk ke panggung internasional. Perjumpaan dengan pegiat selancar Indonesia, Tipi Jabrik, menjadi awal terbukanya hubungan dengan WSL.

Pemkab menjalankan peran strategis dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan, sementara pelaksanaan teknis dilakukan oleh PSOI. Skema pembagian peran ini memperlihatkan kolaborasi lintas aktor, dengan PSOI menangani penyelenggaraan teknis kompetisi dan Pemkab memfasilitasi kebutuhan administratif, logistik, dan pendanaan melalui APBD. Meski dana terbatas, transparansi dan pengelolaan anggaran menjadi prinsip penting dalam menjaga keberlangsungan acara (Komunikasi Pribadi, 20 November 2024).

Dari perspektif teori, paradiplomasi yang dilakukan oleh Kabupaten Pesisir Barat menggambarkan model paradiplomasi regional (makroregional). Sesuai dengan pendapat Soldatos (2001), dalam praktiknya paradiplomasi tersebut hanya menyentuh kebutuhan daerah dan warga di daerah tersebut, dan tidak terjadi dengan daerah asing lain yang berbatasan secara langsung, melainkan melibatkan aktor non-negara atau organisasi internasional (WSL).





Walaupun paradiplomasi oleh Pemkab Pesisir Barat dalam studi ini juga menyentuh beberapa karakteristik model *harmonious parallel*, seperti kemandirian dalam penyelenggaraan (dari inisiasi sampai eksekusi), kompetensi konstitusional (otonomi daerah, asas desentralisasi), kreativitas dalam mengejar kepentingan/kebutuhan daerah, dan intervensi pemerintah pusat yang kecil (persetujuan dan pengawasan), tulisan ini berargumen bahwa paradiplomasi tersebut lebih dekat kepada model *cooperative action (coordinated-cooperative)*.

Argumen ini didukung oleh dua hal: pertama, derajat otonomi daerah di Indonesia umumnya rendah-moderat, di mana aktivitas kerja sama internasional daerah harus mengantongi persetujuan dari kementerian/instansi terkait; dan kedua, koordinasi daerah-pusat umumnya bersifat formal, terinstitusi dalam relasi pemda-pusat, diatur dalam berbagai peraturan, bahkan di dalam Undang-Undang tentang Otonomi Daerah. Kedua alasan tersebut selaras dengan temuan bahwa arsitektur rezim paradiplomasi Indonesia cenderung administratif, prosedural, dan teknis (Surwandono & Maksum, 2020).

Walau demikian, model paradiplomasi ini masih berada dalam kerangka *coordinated decentralization* di mana subnasional, dalam hal ini Pemkab Pesisir Barat, dapat melakukan kerja sama dan berinteraksi dengan aktor luar negeri masih dalam kerangka kepentingan nasional atau tidak bertentangan dengan politik luar negeri negara (Soldatos, 2001). Selain itu, *event* untuk memajukan daerah ini selaras dengan upaya negara dalam melakukan pembangunan secara merata. Artinya, paradiplomasi dalam penyelenggaraan WSL Krui Pro merupakan *complementary* terhadap politik luar negeri sesuai dengan pendapat Schiavon (dalam Ksenicz, 2023). Dengan demikian, paradiplomasi oleh Pemkab Pesisir Barat merupakan peluang (*opportunity-oriented*) bagi Indonesia secara umum karena subnasional dapat berperan mendukung kemajuan bangsa di tingkat lokal dengan terlibat dalam aktivitas internasional seperti yang disebutkan oleh Kuznetsov (2015).

Paradiplomasi yang dilakukan Pemkab Pesisir Barat memperlihatkan bahwa meskipun terdapat keterbatasan dari sisi regulasi dan pendanaan, peran aktif dan strategis pemerintah daerah tetap dapat menginisiasi kerja sama luar negeri. Kehadiran PSOI sebagai mitra teknis dan penghubung memperkuat kapasitas daerah dalam menjalin hubungan internasional, sekaligus mengatasi keterbatasan pemerintah daerah dalam melakukan kontrak langsung dengan aktor asing. Secara keseluruhan, keberhasilan pelaksanaan WSL Krui Pro menjadi contoh nyata praktik paradiplomasi yang relevan dengan konteks Indonesia di tengah tantangan berupa perbedaan sistem administrasi keuangan dan peraturan (Komunikasi Pribadi, 20 November 2024).

### **3. Tujuan Paradiplomasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat**

Paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemkab Pesisir Barat melalui penyelenggaraan WSL Krui Pro mencerminkan upaya daerah dalam membangun hubungan luar negeri untuk kepentingan pembangunan lokal. Berdasarkan pendapat Lecours (2008), tujuan paradiplomasi tersebut dapat dilihat dalam lapisan pertama (ekonomi) dan lapisan kedua (budaya, teknis, dll.). Pertama, paradiplomasi ditujukan untuk mendorong pertumbuhan





ekonomi daerah melalui promosi pariwisata. Pemkab Pesisir Barat memanfaatkan potensi ombak kelas dunia untuk menarik wisatawan mancanegara dan mendongkrak sektor ekonomi lokal. Melalui kerja sama dengan WSL dan PSOI, pemerintah kabupaten memposisikan Pesisir Barat sebagai destinasi selancar internasional. Penguatan sektor ekonomi kreatif dan peningkatan pendapatan daerah melalui pengembangan UMKM dan sektor jasa juga menjadi penting dengan penyelenggaraan *event* internasional tersebut.

Dampak positif dari ajang ini terasa di berbagai sektor ekonomi masyarakat – khususnya masyarakat lokal di Desa Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat yang menjadi lokasi penyelenggaraan Krui Pro – seperti akomodasi, kuliner, jasa wisata, fotografi, dan penjualan souvenir, seperti di bawah ini (Yuhista, 2020):

Tabel 1. Dampak Ekonomi Penyelenggaraan WSL Krui Pro Terhadap Masyarakat Lokal

| No | Jenis Usaha                                         | Dampak Ekonomi (dalam Rupiah) |                |             |
|----|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|
|    |                                                     | Langsung                      | Tidak Langsung | Lanjutan    |
| 1  | Akomodasi                                           | 1.557.600.000                 | 388.520.073    | 224.693.333 |
| 2  | Cafe/Resto                                          | 58.666.668                    | 29.675.000     | 18.205.000  |
| 3  | Rental Wisata                                       | 68.000.001                    | 61.500.000     | 17.940.000  |
| 4  | Jasa Fotografer<br>/ Perbaikan<br>Papan Selancar    | 95.000.000                    | 27.350.000     | 17.365.000  |
| 5  | Souvenir dan<br>Kios Warung<br>Makan dan<br>Minuman | 26.250.000                    | 8.625.000      | 15.755.000  |

Sumber: Yuhista (2020)

Tabel 1 menunjukkan penyelenggaraan event surfing internasional memberikan dorongan ekonomi yang paling besar terhadap sektor akomodasi. Aktivitas ekonomi yang digerakkan langsung oleh kunjungan wisatawan merupakan sumber utama sirkulasi finansial. Sektor-sektor lain yang menjadi pendukung tetap mendapatkan dampak ekonomi, namun lebih kecil atau terbatas dibandingkan dengan sektor akomodasi.

Di sisi lain, meningkatnya kunjungan wisatawan dan realisasi investasi, terutama pada sektor *real estate* dan penginapan. Jumlah signifikan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara sejak 2017 (sempat terkoreksi karena COVID-19), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2, menjadi indikator keberhasilan strategi paradiplomasi daerah melalui ajang olahraga internasional.







Tabel 2. Jumlah Wisatawan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2014-2022

| No | Tahun | Jumlah Wisatawan |             | Jumlah Total | Persentase Peningkatan<br>(Dibandingkan Tahun<br>Sebelumnya) |             |
|----|-------|------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
|    |       | Domestik         | Mancanegara |              | Domestik                                                     | Mancanegara |
| 1  | 2014  |                  | 3.521       | 3.521        |                                                              |             |
| 2  | 2015  |                  | 8.866       | 8.866        |                                                              | 151,80%     |
| 3  | 2016  | 31.889           | 15.489      | 47.378       |                                                              | 74,70%      |
| 4  | 2017  | 104.456          | 31.341      | 135.797      | 225,76%                                                      | 102,34%     |
| 5  | 2018  | 128.338          | 37.945      | 166.283      | 22,86%                                                       | 21,07%      |
| 6  | 2019  | 15.802           | 2.301       | 18.103       | -87,69%                                                      | -93,94%     |
| 7  | 2020  | 10.615           | 228         | 10.843       | -32,82%                                                      | -90,09%     |
| 8  | 2021  | 18.875           | 74          | 18.949       | 77,81%                                                       | -67,54%     |
| 9  | 2022  | 36.070           | 26.106      | 62.176       | 91,10%                                                       | 35178,38%   |

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Lampung (2023)

Kedua, paradiplomasi dimanfaatkan untuk memperkuat identitas budaya dan mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Penyelenggaraan *event* WSL Krui Pro tidak hanya menampilkan kompetisi olahraga, tetapi juga menggabungkan elemen budaya lokal seperti pertunjukan seni, pameran kuliner, dan bazar produk UMKM. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah berupaya memperkenalkan identitas lokal dan kekayaan budaya lokal kepada audiens internasional atau dunia luar (Komunikasi Pribadi, 20 November 2024). Identitas dalam konteks paradiplomasi Kabupaten Pesisir Barat ini lebih cenderung pada pengenalan budaya lokal, bukan dalam konteks lapisan politik yang diutarakan oleh Lecours (2008). Paradiplomasi yang dilakukan bukan untuk mengonfirmasi perbedaan identitas, otonomi politik, dan karakter bangsa (Lampung/Pesisir Barat) sebagai *positioning* ataupun *bargaining* terhadap pemerintah nasional Indonesia. Studi ini tidak menemukan bukti yang kuat yang mengarah ke hal tersebut.



Gambar 4. Penampilan Pentas Budaya pada Pembukaan WSL Krui Pro 2024

Sumber: Media Investigasi Mabes (2024)







Selain itu, dari sisi promosi, WSL Krui Pro sebaliknya menjadi ajang *branding* internasional bagi Pesisir Barat (Komunikasi Pribadi, 20 November 2024). Sebagai daerah yang belum dikenal secara luas dan masih tertinggal, khususnya dalam industri pariwisata, dengan adanya penyelenggaraan *event* WSL Krui Pro, Kabupaten Pesisir Barat berupaya mendapatkan rekognisi nasional dan internasional sebagai destinasi pariwisata yang mampu menyelenggarakan *event* internasional, seperti halnya Bali. Beberapa studi telah menggambarkan bahwa menjadi tuan rumah *event* olahraga internasional merupakan strategi yang dapat digunakan oleh daerah, termasuk untuk membangun *branding* ke dalam dan luar negeri (Luerdi, 2023; Ramadhan et al., 2022).

Selain itu, kegiatan ini mendorong proses pembelajaran dan transfer pengetahuan, terutama dalam pengelolaan *event* internasional, yang memberikan dampak positif pada peningkatan keterampilan SDM lokal. Pemkab Pesisir Barat dan PSOI mengadakan pelatihan teknis bagi masyarakat, termasuk pelatihan juri, panitia, dan relawan. Kerja sama ini juga memberikan ruang bagi atlet lokal untuk tampil di ajang internasional, membuka peluang prestasi di kancah global (Komunikasi Pribadi, 20 November 2024). Ini menunjukkan bahwa paradiplomasi tidak hanya menghasilkan keuntungan jangka pendek dari sektor ekonomi dan pariwisata, tetapi juga menciptakan efek jangka panjang berupa pembangunan kapasitas institusional dan peningkatan keterampilan dan pengalaman masyarakat. Dengan melihat tujuan-tujuan paradiplomasi di atas, pemerintah daerah berhasil membangun kerja sama internasional yang mendukung pembangunan daerah tanpa menyalahi kewenangan pusat. Ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, paradiplomasi dapat menjadi sarana strategis bagi daerah untuk meningkatkan daya saing, memperluas jejaring global, dan memperkuat identitas lokal.

## V. Kesimpulan

Penyelenggaraan WSL Krui Pro di Kabupaten Pesisir Barat merupakan bentuk konkret praktik paradiplomasi, di mana pemerintah daerah menjalin kerja sama internasional untuk mempromosikan potensi lokal serta memperkuat pembangunan daerah. Kerja sama internasional tersebut dapat menggambarkan paradiplomasi regional dan lebih dekat kepada *cooperative action*. Dalam praktik paradiplomasi yang *opportunity-oriented* tersebut, Pemkab Pesisir Barat dapat memainkan peran *complementary* melalui kerja sama luar negeri dengan pihak asing. Tujuan paradiplomasi tersebut dapat menggambarkan upaya lokal untuk mengejar kepentingan ekonomi, budaya, dan teknis.

Melalui studi kasus paradiplomasi oleh Pemkab Pesisir Barat, hubungan atau kerja sama luar negeri oleh subnasional pada dasarnya dapat terjadi secara *bottom-up*, bahkan oleh pemerintah di level paling bawah (kabupaten) yang selama ini masih belum terbiasa dengan kerja sama luar negeri. Kolaborasi transnasional dapat dikembangkan dengan melibatkan komunitas atau organisasi yang memiliki jejaring internasional. Studi lebih lanjut mengenai keberlanjutan kerja sama dengan WSL juga perlu dilakukan untuk menilai efektivitas jangka panjang kerja sama tersebut. Selain itu, studi perbandingan antardaerah, khususnya daerah yang masih tertinggal yang menerapkan strategi paradiplomasi, dapat memberikan perspektif mengenai faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang tentunya akan memperkaya pengetahuan tentang paradiplomasi Indonesia.





## Referensi

- Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. (2023). *Data kunjungan wisatawan Kabupaten Pesisir Barat*.
- Diva, M., Azis, M. A., & Deniar, S. M. (2024). Festival wisata budaya internasional 2023 sebagai paradiplomasi dan upaya pelestarian budaya lokal oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 10(2), 397–407.
- Komunikasi Pribadi. (2024). *Wawancara Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat, Pesisir Barat, 20 November 2024*.
- Kosovac, A., Hartley, K., Acuto, M., & Gunning, D. (2021). City leaders go abroad : a survey of city diplomacy in 47 cities. *Urban Policy and Research*, 39(2), 127–142. <https://doi.org/10.1080/08111146.2021.1886071>
- Ksenicz, I. (2023). Frameworks of paradiplomacy. Cases of selected unitary states: France, the Netherlands and Czechia. *Eastern European Journal of Transnational Relations*, 7(2), 59–75. <https://doi.org/10.15290/eejtr.2023.07.02.07>
- Kuznetsov, A. (2015). *Theory and practice of paradiplomacy: subnational governments in international affairs*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315817088>
- Lecours, A. (2002). Paradiplomacy: reflections on the foreign policy and international relations of regions. *International Negotiation*, 7(1), 91–114. [https://brill.com/view/journals/iner/7/1/article-p91\\_8.xml](https://brill.com/view/journals/iner/7/1/article-p91_8.xml)
- Lecours, A. (2008). Political issues of paradiplomacy: lessons from the developed world. In *Discussion Papers in Diplomacy*. Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael.' <http://www.jstor.com/stable/resrep05373>
- Luerdi, L. (2023). Jakarta's city branding as para-diplomacy: beyond greening stadium and race. *Janus.Net, e-Journal of International Relations*, 14(1), 142–169. <https://doi.org/10.26619/1647-7251.14.1.9>
- Media Investigasi Mabes. (2024, June 2). *Masih acara kegiatan WSL Krui Pro Bupati hadir pentas budaya di Tanjung Setia*. <https://mediainvestigasimabes.co.id/2024/06/02/masih-acara-kegiatan-wsl-krui-pro-bupati-hadiri-pentas-budaya-di-tanjung-setia/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publication, Inc.
- Moshtari, M., Zaefarian, G., & Vanpoucke, E. (2024). How stakeholder pressure affects the effectiveness of international-local nongovernmental organization collaboration in localization of humanitarian aid. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 53(4), 866–897. <https://doi.org/10.1177/08997640231196886>
- Pemkab Pesisir Barat. (2024a). *Pesibar resmi lepas sebagai daerah tertinggal*. <https://pesisirbaratkab.go.id/berita/pesibar-resmi-lepas-sebagai-daerah-tertinggal>
- Pemkab Pesisir Barat. (2024b). *WSL Krui Pro 2024 kembali digelar 28 Mei mendatang*. <https://pesisirbaratkab.go.id>
- Pemkab Pesisir Barat. (2025). *Peta Kabupaten Pesisir Barat*. <https://pesisirbaratkab.go.id/ahmad-nalpa>
- Pemprov Lampung. (2024). *Gubernur Arinal Djunaidi harapkan World Surfing League (WSL) Krui Pro jadi momentum memajukan pariwisata Lampung dan selancar di*





- Indonesia. <https://lampungprov.go.id/detail-post/gubernur-arinal-djunaidi-harapkan-world-surfing-league-wsl-krui-pro-jadi-momentum-memajukan-pariwisata-lampung-dan-selancar-di-indonesia>
- Rachmawati, I., & Dewi, M. A. (2020). Paradiplomacy roles in border diplomacy. Case study: Camar Bulan, Temajok, West Kalimantan, Indonesia. *Athens Journal of Social Sciences*, 7(2), 103–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.30958/ajss.7-2-2>
- Ramadhan, F., Susiatiningsih, H., & Wahyudi, F. E. (2022). Paradiplomasi Provinsi DKI Jakarta terkait penyelenggaraan Formula E. *Journal of International Relations*, 8(3), 489–498. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jirud.v8i3.34657>
- Rapoport, E., Acuto, M., & Grcheva, L. (2019). *Leading cities: a global review of city leadership*. University College London Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/j.ctv8jp0qg>
- Sidik, H. (2019). Paradiplomasi Lampung: harapan dan realitas. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 21(2), 201–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/sosiologi.v21i2.352>
- Simbolon, K. (2022). Potensi dan tantangan paradiplomasi Bandar Lampung. *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia*, 4(1), 1–12. <https://jhii.fisip.unila.ac.id/index.php/jhii/article/view/7>
- Soldatos, P. (2001). An explanatory framework for the study of federated states as foreign-policy actors. In H. J. Michelmann & P. Soldatos (Eds.), *Federalism and International Relations: The Role of Subnational Units* (pp. 34–53). Oxford University Press.
- Surwandono, S., & Maksum, A. (2020). The architecture of paradiplomacy regime in Indonesia: a content analysis. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 22(1), 77–99. <https://doi.org/10.7454/global.v22i1.443>
- Tran, L., & Abouassi, K. (2020). Local organizational determinants of local-international NGO collaboration. *Public Management Review*, 27(5), 827–846. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1708436>
- Tubilewicz, C., & Omond, N. (2021). *The United States' subnational relations with divided China: a constructivist approach to paradiplomacy*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003166429>
- Wolff, S. (2007). Paradiplomacy: scope, opportunities and challenges. *Bologna Center Journal of International Affairs*, 10, 141–150. <https://www.saisjournal.eu/DOCUMENTS/VOLUMEPDFS/B092C4C2-ECD4-8641-E1236E621CE5BA4F.pdf>
- World Surf League. (2024). *Krui Pro 2024 – finals day*. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=1KMy67L620s&t=6395s>
- Yuhista, A. (2020). *Dampak ekonomi sport tourism surfing terhadap pendapatan masyarakat lokal di kawasan wisata Pantai Tanjung Setia, Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung*. Universitas Udayana.

